



Jurnal Kultur Demokrasi

<https://jips.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/manager>

E-ISSN: 2746-2749

Volume 15, No 1, Juni 2026

ANTARA RUANG GEMA DAN RUANG HAMPA: CIVIC VIRTUE DI TENGAH KRISIS LITERASI DIGITAL

¹Jaya Pratama, ²Melani Safitri, ³Zahwa Alya Salsabila, ⁴Davina Azzahra Apriria,

⁵Ghaitsa Zahira Maida Shofa, ⁶Risheila Inka Lyisti

Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Bandar Lampung – Lampung
35145, Indonesia.

[e-mail: 1 Jaya Pratamaaaa12@gmail.com](mailto:1JayaPratamaaaa12@gmail.com)

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan kemudahan dalam memperoleh serta menyebarkan informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran hoaks, disinformasi, dan terbentuknya *echo chamber* pada era *post-truth*. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membedakan fakta dan opini, meningkatkan polarisasi, serta melemahkan kohesi sosial dan kualitas demokrasi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak fenomena *echo chamber* dan krisis literasi digital terhadap kehidupan masyarakat Indonesia serta mengkaji peran *civic virtue* sebagai landasan dalam menghadapi disinformasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dan wawancara. Survei dilakukan terhadap 102 responden dari kalangan keluarga, teman sebaya, dan kerabat di wilayah Lampung, sedangkan wawancara dilakukan dengan petugas ASN Kemenipipas untuk memperoleh informasi mengenai kondisi literasi digital dan pembinaan warga binaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam membedakan fakta dan opini di media sosial. TikTok menjadi platform yang paling banyak digunakan responden untuk memperoleh informasi dengan persentase 66,7%. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital yang disertai kemampuan berpikir kritis, verifikasi informasi, dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. *Civic virtue* dapat menjadi landasan etis dalam membentuk perilaku warga negara yang kritis, rasional, bertanggung jawab, dan menghargai pluralitas. Penguatan literasi digital dan nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk membangun ketahanan informasi serta menjaga kohesi sosial dan kualitas demokrasi di era digital.

Kata kunci: literasi digital, disinformasi, *echo chamber*, *post-truth*, *civic virtue*.

Abstract

The development of information technology and social media has provided greater access to information and facilitated its dissemination. However, it has also created challenges in the form of hoaxes, disinformation, and the formation of echo chambers in the post-truth era. These conditions may affect people's ability to distinguish facts from opinions, increase social polarization, and weaken social cohesion and the quality of democracy. This study aims to analyze the impact of echo chamber phenomena and the digital literacy crisis on Indonesian society and examine the role of civic virtue as a foundation for addressing disinformation. This study employed survey and interview approaches. The survey involved 102 respondents

Keywords: digital literacy, disinformation, echo chamber, post-truth, civic virtue.

Pendahuluan

Literasi mencakup kemampuan untuk membaca, menulis, memahami bahasa, serta menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam perspektif klasik, literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi di era modern ini, literasi memiliki pemahaman yang lebih luas, termasuk keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, menganalisis media, dan menerapkan pemikiran kritis. Literasi memiliki peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan, karena melalui literasi, individu dapat memperkaya pengetahuan, mengembangkan rasa ingin tahunya, dan meningkatkan kreativitasnya (Dinata, 2021).

Dinamika kemajuan ilmu pengetahuan terus bergerak menuju kompleksitas yang lebih tinggi, ini disebabkan oleh keinginan manusia untuk mengalami perubahan dan meningkatnya kebutuhan yang menciptakan berbagai persoalan baru. Perkembangan dalam kehidupan manusia melahirkan pemikiran yang dikenal dengan nama modernisme, yang menyatakan bahwa kebenaran dari suatu ilmu harus bersifat absolut, objektif, dan tak terpengaruh oleh nilai-nilai manusia. Evolusi pengetahuan dan teknologi yang dipicu oleh modernisme membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Perang, tindak kekerasan, dan kekacauan dalam sejarah umat manusia muncul akibat rendahnya nilai kemanusiaan itu sendiri. Sebagai respons, muncul suatu paham lain yang dinamakan post-modernisme, yang berargumen bahwa sifat ilmu pengetahuan tidak bersifat objektif tapi subjektif. Dengan kata lain, interpretasi atas pengetahuan berasal dari diri manusia sendiri, sehingga kebenaran yang mereka temukan menjadi relatif. Munculnya paham postmodernisme ini lantas menciptakan suatu era baru yang dikenal sebagai post-truth (pasca kebenaran) (Setiawan & Sudrajat, 2018). Era *post-truth* ditandai oleh dominasi emosi dan opini subjektif dalam membentuk persepsi publik, sering kali mengalahkan fakta objektif. Fenomena *echo chamber* di media sosial memperkuat bias kognitif dengan menciptakan ruang interaksi yang homogen, di mana individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan mereka. Akibatnya, polarisasi sosial semakin tajam, penyebaran disinformasi meningkat, dan kualitas pemikiran publik menurun. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi demokrasi dan kohesi sosial di Indonesia.

Dalam konteks kebangsaan, *echo chamber* berpotensi melemahkan nilai persatuan dan mengancam integrasi nasional. Ketika masyarakat terjebak dalam ruang gema informasi, sikap intoleran terhadap perbedaan semakin menguat, sehingga menghambat terciptanya diskusi publik yang sehat. Civic virtue yakni kebajikan warga negara dalam menjaga kepentingan bersama, mengedepankan rasionalitas, dan menghargai pluralitas menjadi fondasi penting untuk membangun resiliensi masyarakat. Manifesto civic virtue diperlukan sebagai pedoman normatif untuk mengarahkan perilaku warga negara agar mampu menghadapi tantangan era *post-truth*.

Fenomena *echo chamber* di era *post-truth* telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan kohesi sosial masyarakat Indonesia. Ketika ruang publik digital dipenuhi oleh informasi yang seragam dan bias, warga negara cenderung terjebak dalam lingkaran opini yang memperkuat pandangan pribadi tanpa membuka diri pada perspektif berbeda. Kondisi ini memperparah polarisasi sosial, melemahkan toleransi terhadap perbedaan, serta menurunkan kualitas pemikiran demokratis yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Demokrasi yang idealnya berlandaskan pada pertukaran gagasan rasional dan inklusif justru terancam oleh fragmentasi sosial yang lahir dari ruang gema digital.

Data Kominfo secara resmi mencatat bahwa sejak Agustus 2018 hingga 31

Desember 2023, total terdapat 12.547 isu hoaks yang beredar di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1. Temuan Isu Hoaks Periode Agustus 2018 – 31 Desember 2023



Gambar 2. Temuan Isu Hoaks Per Kategori Periode Agustus 2018 – 31 Desember 2023



Sumber: Kominfo, 2023

Dari data tersebut, hoaks terbanyak berasal dari kategori kesehatan (2.357 kasus), penipuan dan pemerintahan (masing-masing 2.210 kasus), serta politik (1.628 kasus), yang mencerminkan betapa luasnya jangkauan disinformasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, konsep *civic virtue* dapat dijadikan strategi normatif untuk membangun resiliensi masyarakat. Civic virtue menekankan kebajikan warga negara dalam menjaga kepentingan bersama, mengedepankan rasionalitas, serta menghargai pluralitas. Dengan menumbuhkan civic virtue, masyarakat Indonesia dapat memperkuat daya tahan terhadap dampak negatif *echo chamber*, sekaligus mengembalikan semangat pemikiran publik yang sehat. Manifesto civic virtue menjadi penting sebagai pedoman kolektif, agar warga negara tidak hanya kritis terhadap informasi yang diterima, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga integrasi nasional dan kualitas demokrasi di tengah arus disinformasi era *post-truth*.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak fenomena *echo chamber* dalam era *post-truth* terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada aspek kualitas demokrasi dan kohesi sosial masyarakat Indonesia. Analisis ini diharapkan mampu memperlihatkan bagaimana ruang publik digital yang

terfragmentasi dapat melemahkan integrasi nasional serta menurunkan kualitas pemikiran demokratis. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk merumuskan gagasan *manifesto civic virtue* sebagai strategi normatif dalam membangun resiliensi masyarakat Indonesia. Dengan menekankan kebajikan warga negara dalam menjaga kepentingan bersama, mengedepankan rasionalitas, dan menghargai pluralitas, manifesto ini diharapkan menjadi pedoman kolektif dalam menghadapi tantangan era *post-truth* serta memperkuat fondasi demokrasi dan persatuan bangsa.

Tinjauan Pustaka

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi dan konsumsi informasi masyarakat. Media sosial seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, Youtube, dan WhatsApp telah menjadi sumber utama informasi, ruang diskusi, serta sarana aktualisasi diri. Kemudahan akses informasi yang cepat dan masif tersebut di satu sisi memberikan peluang besar untuk memperluas wawasan, tetapi di sisi lain juga membuka ruang terhadap paparan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan (Yanto & Sari, 2025).

Tingginya arus informasi di media sosial menciptakan kondisi yang disebut sebagai *information overload* atau banjir informasi, yaitu situasi di mana individu menerima begitu banyak informasi sehingga kesulitan untuk menyaring mana yang relevan dan benar. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis dan literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital melibatkan lebih dari sekedar kemampuan dalam menggunakan alat teknologi; itu juga termasuk keterampilan dalam memahami, menganalisis, menilai, dan menciptakan informasi dengan cara yang bertanggung jawab. Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat rentan menerima dan bahkan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya (Nisa, 2024). Hal ini dapat memunculkan sebuah istilah disinformasi yang merujuk pada penyebaran informasi yang secara sadar palsu dan menyesatkan, dengan tujuan menciptakan kebingungan, merusak kredibilitas, atau menimbulkan konflik dalam masyarakat (Wardle & Derakhsan, 2017).

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial yang besar, sangat rentan terhadap arus informasi menyesatkan. Menurut laporan We Are Social (2024), lebih dari 170 juta masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial, dengan interaksi digital yang terus meningkat setiap tahun. Angka tersebut menunjukkan potensi besar untuk penguatan partisipasi demokratis, namun juga memperbesar risiko paparan disinformasi, ujaran kebencian, serta narasi yang dapat melemahkan kohesi sosial (Mustain, 2022). Ditingkat praktis, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ribuan konten hoaks yang tersebar setiap tahunnya, sering kali memuncak menjelang momen-momen politik seperti Pemilu. Fakta ini menunjukkan betapa besarnya ancaman hoaks terhadap ketahanan informasi dan kerukunan sosial bangsa.

Kesenjangan akses dan kemampuan literasi digital masih menjadi persoalan bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk warga binaan yang sebagian besar berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Kesenjangan tersebut menghambat mereka dalam memperoleh kompetensi digital yang penting untuk reintegrasi sosial dan keberhasilan setelah menjalani masa pidana (UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan). Oleh sebab itu, program pembinaan literasi digital di lembaga pemasasyarakatan menjadi salah satu upaya rehabilitasi yang penting dan strategis (Azis & Kurniawan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa krisis *post-truth* menimbulkan banjir informasi di luar, sekaligus *isolasi kognitif* bagi warga Lapas.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pembinaan literasi digital dapat meningkatkan keterampilan teknis dan *soft skills* warga binaan, sehingga membuka peluang yang lebih baik untuk reintegrasi sosial dan pengurangan angka residivisme. Penelitian lapangan di beberapa Lapas mengindikasikan keberhasilan program ini dalam memberikan keterampilan komputer dasar, pengelolaan konten digital, dan pengembangan kemampuan manajemen tugas (Ginting *et al.*, 2021; Handayani *et al.*, 2022). Namun, kendala signifikan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan fasilitas, kurangnya instruktur profesional, dan ketiadaan regulasi baku yang mengatur pelaksanaan program secara sistematis.

Dalam konteks literasi digital pada lingkungan masyarakat terdapat banyak kasus penipuan misalnya, “gebyar hadiah” menjadi contoh yang penting untuk dikaji karena pendekatan yang diterapkan oleh pelaku sangat licik, dengan menggunakan cerita yang menyentuh emosi seperti tawaran iming-iming yang menarik. Kejadian ini tidak hanya menggambarkan rendahnya kemampuan literasi digital di kalangan masyarakat, tetapi juga menunjukkan bagaimana berita palsu bisa memanfaatkan teknologi dan algoritma media sosial untuk menyebar secara cepat.

Gambar 3. Contoh-Contoh Berita Hoaks.



Sumber: Media Sosial Facebook dan X (Twitter).

Selain kasus-kasus di atas, berikut ini adalah beberapa contoh kasus penyebaran berita palsu di Indonesia yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, disertai dengan platform yang digunakan, kategori hoaks, serta efeknya terhadap masyarakat:

Tabel 1. Kasus Penyebaran Hoaks dan Dampaknya di Indonesia

No.	Kasus Hoaks	Waktu Kejadian	Platform	Karakteristik Hoaks	Dampak	Referensi
1	Hoaks Gempa Susulan 7,5 SR di Palu	September 2018	WhatsApp, Facebook	Bencana Alam (Hoaks Gempa Bumi)	Kepanikan warga, mobilisasi masyarakat yang tidak perlu	(BMKG, 2018)

	Hoaks Surat Suara Tercoblos di Tanjung Priok	Januari 2019	WhatsApp	Politik (Pemilu)	Meningkatkan ketegangan politik dan ketidakpercayaan pada KPU	(Kompas.com, 2019)
3	Hoaks “Gambar Ular Piton Raksasa di Waduk Jatiluhur”	Februari 2024	Facebook, WhatsApp	Kejadian Luar Biasa	Kepanikan publik dan kekeliruan informasi	(Tim detik net, 2024)
4	Hoaks Vaksin Covid-19 Mengandung Microchip	Desember 2021	WhatsApp, Youtube	Kesehatan (Covid-19)	Meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap vaksinasi	(Kemenkes RI, 2021)
5	Hoaks BBM Subsidi Akan Hilang	Agustus 2022	WhatsApp, Facebook	Ekonomi (Kebijakan Subsidi)	Kepanikan masyarakat dan antrean panjang di SPBU	(detik Finance, 2022)
6	Hoaks Penculikan Anak dengan Mobil Berwarna Hitam	Januari 2022	TikTok, WhatsApp	Kriminalitas	Ketakutan publik, serangan terhadap individu yang tidak bersalah	(Liputan 6.com, 2022)

Sumber: Sarjito, (2024).

Kasus-kasus hoaks di Indonesia menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara negatif untuk menyebarkan informasi palsu yang meresahkan publik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah mengambil berbagai langkah-langkah, seperti penanganan konten tidak benar, pendidikan tentang literasi digital, dan kerja sama dengan platform media sosial untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah (Suharyanto, 2019).

Di samping itu, perlu ada peningkatan kesadaran bersama di kalangan masyarakat untuk menjadi lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memperkuat kemampuan literasi digital untuk mengatasi penyebaran hoaks di masa mendatang (Sulianta, 2020). Dengan peningkatan dalam literasi digital dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan warga Indonesia dapat terhindar dari efek negatif akibat penyalahgunaan teknologi informasi melalui penyebaran hoaks (Sarjito, A., 2024).

Untuk menjaga ketahanan nasional dari ancaman hoaks dan disinformasi, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan perusahaan teknologi. (Anwar, 2021) menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia sebagai langkah kunci dalam melawan penyebaran hoaks. Literasi digital yang kuat akan

membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi dan tidak mudah percaya pada berita palsu yang disebar di media sosial (Palupi, 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dan wawancara untuk memperoleh data mengenai kondisi literasi digital masyarakat serta ketahanan dalam menghadapi krisis informasi. Survei dilakukan terhadap 102 responden yang berasal dari kalangan keluarga, teman sebaya, dan kerabat di wilayah Lampung. Survei digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan media sosial sebagai sumber informasi, kemampuan responden dalam membedakan fakta dan opini, serta pandangan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam mengatasi krisis informasi. Wawancara dilakukan dengan salah satu petugas ASN Kemenimipnas untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi literasi digital, keterbatasan akses informasi, serta pembinaan warga binaan. Data hasil survei dianalisis secara deskriptif berdasarkan persentase jawaban responden, sedangkan data hasil wawancara dianalisis secara kualitatif deskriptif. Kedua data tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis fenomena krisis literasi digital, penyebaran hoaks, *echo chamber*, dan peran *civic virtue* dalam membangun ketahanan masyarakat di era digital

Temuan dan Pembahasan

Dalam menyelesaikan tugas esai ini, tim kami menerapkan dua pendekatan utama, yaitu survei dan wawancara. Survei dirancang untuk mendapatkan informasi langsung dari para responden mengenai subjek yang diteliti, sehingga dapat menghasilkan analisis kuantitatif tentang pandangan dan pengalaman dari responden. Di sisi lain, pendekatan lain yang dilakukan yaitu dengan mewawancarai salah satu petugas ASN Kemenimipnas untuk mengumpulkan data kualitatif yang lebih mendalam mengenai praktik dan fenomena yang terjadi di lapangan. Penggabungan kedua pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih menyeluruh, sekaligus memperkuat keabsahan hasil penelitian.

Kasus hoaks dan informasi yang menyesatkan di Indonesia menunjukkan bagaimana informasi digital digunakan secara merugikan untuk mempengaruhi pandangan publik. Hoaks tentang gempa susulan di Palu dan ular piton besar di Jatiluhur menggambarkan pemanfaatan isu bencana alam untuk menciptakan kepanikan. Hoaks mengenai suara tercoblos dan masalah subsidi BBM menunjukkan adanya manipulasi dalam isu politik dan ekonomi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sementara itu, hoaks terkait vaksin Covid-19 yang mengandung microchip serta isu penculikan anak menggunakan mobil hitam menunjukkan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat serta ketenangan sosial. Untuk memperkuat pemahaman mengenai maraknya penyebaran hoaks di Indonesia, terdapat pula kasus-kasus terbaru yang terjadi pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026.

Tabel 2. Kasus Penyebaran Hoaks Desember 2025-Januari 2026

No.	Kasus Hoaks	Waktu Kejadian	Platform	Karakteristik Hoaks	Dampak	Referensi
1	Hoaks Video Menkeu Purbaya Beri Bantuan Rp 50 Juta	Desember 2025	Facebook	Politik/Keuangan (Deepfake AI)	Potensi penipuan dan kerugian finansial masyarakat	(Liputan6.com, 2025)
2	Hoaks Link Pendaftaran CPNS 2026	Desember 2025	Facebook	Politik/Kepegawaian	Pencurian data identitas dan penipuan finansial	(Liputan6.com, 2025)
3	Hoaks Link Pendaftaran Prakerja 2025 Gelombang 72	Desember 2025	Facebook	Sosial/Ketenagakerjaan	Pencurian data pribadi termasuk nomor Telegram	(Liputan6.com, 2025)
4	Hoaks Super Flu Lebih Parah dari Covid-19	Januari 2026	Facebook	Kesehatan	Kepanikan publik dan kekhawatiran terhadap wabah baru	(Liputan6.com, 2026)
5	Hoaks Link Hadiah PLN Tahun Baru 2026	Januari 2026	WhatsApp	Penipuan Digital (Phishing)	Pencurian data pribadi masyarakat	(Liputan6.com, 2026)
6	Hoaks Pertamina Bagikan Hadiah Tahun Baru Rp 1,5 Juta via Kuesioner	Januari 2026	WhatsApp	Penipuan Digital (Phishing)	Potensi kerugian finansial dan pencurian data	(Liputan 6.com, 2026)

Sumber: Liputan6.com (2026)

Secara kritis, fenomena ini mengungkapkan tiga poin penting. Pertama, kepekaan masyarakat terhadap informasi yang bersifat emosional yang cepat menyebar di media sosial, menyoroti rendahnya kemampuan untuk memverifikasi. Kedua, pengaruh algoritma di platform digital yang mempercepat penyebaran konten sensasional dibandingkan dengan informasi yang faktual, sehingga hoaks memperoleh peluang lebih besar untuk berkembang. Ketiga, konsekuensi beragam dari hoaks yang tidak hanya menyebabkan kepanikan sementara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat pada institusi pemerintah, kebijakan kesehatan, dan solidaritas sosial.

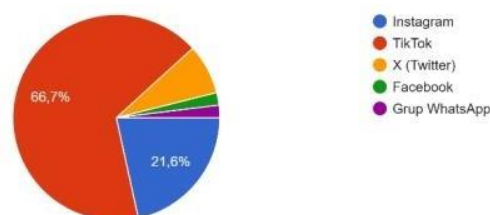
kendala. Beberapa studi mengidentifikasi bahwa masyarakat Indonesia masih rendah dalam literasi digital (Syurfa et al., 2024), kurang mampu memverifikasi sumber informasi (Lewandowsky et al., 2020), serta terjebak dalam echo chamber dan *confirmation* bias akibat algoritma media sosial (Cinelli et al., 2021).

Platform media sosial pun cenderung mendorong konten yang memicu keterlibatan (*engagement*) ketimbang akurasi, sehingga konten sensasional atau provokatif lebih mudah viral dibanding konten yang berbasis fakta dan refleksi etis. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penyelesaian persoalan hoaks dan post-truth tidak cukup dilakukan melalui regulasi atau intervensi teknologi semata. Meski Undang-Undang ITE dan kebijakan konten digital berperan, sifat media sosial yang dinamis dan terdesentralisasi membuat pengendalian formal memiliki keterbatasan. Di sinilah urgensi bagi penelitian yang menempatkan Pancasila sebagai landasan etika media sosial. Tanpa fondasi nilai, literasi digital saja akan menciptakan masyarakat yang mahir teknis namun lemah moral. Nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai filter normatif yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial, serta menjadi mekanisme legitimasi etika dalam wacana publik digital.

Maraknya hoaks dan disinformasi bukan sekadar fenomena teknis, melainkan cermin rapuhnya nalar kritis masyarakat di era post-truth. Di titik ini, literasi digital dan civic virtue menjadi benteng moral yang harus ditumbuhkan: warga negara dituntut untuk tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dalam memilah informasi, menjaga rasionalitas, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tanpa fondasi kebajikan ini, ruang publik digital akan terus dipenuhi bias dan polarisasi.

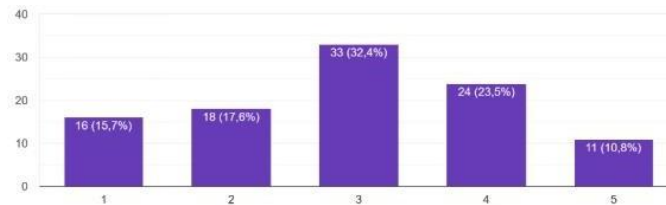
Melalui survei yang melibatkan 102 responden dari kalangan keluarga, teman sebaya, dan kerabat dekat di wilayah Lampung, ditemukan data signifikan yakni:

1. Platform media sosial yang paling sering digunakan untuk mencari informasi.



Dari hasil diagram di atas, dapat diketahui bahwa platform media sosial yang paling banyak digunakan untuk mencari informasi adalah TikTok dengan persentase sebesar 66,7%. Posisi kedua ditempati oleh Instagram dengan 21,6%, kemudian disusul oleh aplikasi X (Twitter). Selanjutnya, aplikasi Facebook dan grup WhatsApp menunjukkan persentase yang sama, yakni sekitar 2%. Temuan ini menunjukkan dominasi TikTok sebagai sumber pencarian informasi di kalangan responden, dengan Instagram sebagai alternatif utama, sementara platform lain relatif kurang diminati. Pada platform TikTok yang mengandalkan konten video pendek dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat. Karakter visual dan narasi singkat yang digunakan TikTok mudah untuk dikonsumsi, namun sering kali tidak disertai proses verifikasi yang memadai. Sehingga dapat memicu disinformasi di media sosial yang berpotensi

membentuk opini publik secara keliru, serta menimbulkan dampak sosial yang luas ketika konten tersebut dikemas secara emosional dan viral (Anwar,2021). Seberapa sering responden ragu/bingung dalam membedakan antara fakta dan opini di media sosial



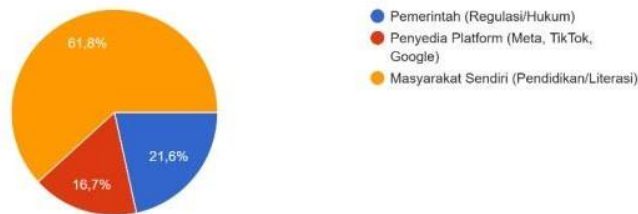
Dari total 102 responden, terlihat bahwa sebagian besar berada pada kategori 3 (32,4%) dan kategori 4 (23,5%). Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat yang jarang hingga sering merasa ragu atau bingung dalam membedakan fakta dan opini di media sosial. Sementara itu, kategori 2 (17,6%) dan kategori 1 (15,7%) menunjukkan adanya kelompok yang relatif jarang mengalami kebingungan, sedangkan kategori 5 (10,8%) menandakan sebagian kecil responden yang sangat sering mengalami keraguan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi digital masyarakat masih belum merata. Sebagian besar responden berada di tengah, artinya mereka kadang mampu membedakan fakta dan opini, tetapi masih sering terjebak dalam bias informasi. Kondisi ini berpotensi melemahkan kualitas diskusi publik, karena opini yang tidak terverifikasi bisa dianggap sebagai fakta.

Dalam konteks *civic-virtue*, hasil ini menegaskan pentingnya menumbuhkan kebajikan warga negara berupa sikap kritis, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam menyaring informasi. Dengan *civic virtue*, masyarakat tidak hanya lebih tangguh menghadapi arus informasi di era *post-truth*, tetapi juga mampu menjaga kohesi sosial dengan mengedepankan kebenaran dan kepentingan bersama.

Berdasarkan informasi yang disampaikan terdapat beberapa cara untuk membedakan berita fakta dan berita hoaks, tahapan untuk mengecek sebuah berita apakah fakta atau hoaks antara lain: (a) Memverifikasi nama domain, (b) Memastikan siapa yang bertanggung jawab (redaksi) dan alamat media, (c) Menelaah informasi domain melalui Whois, (d) Memeriksa tanggal laporan berita, (e) Menganalisis dengan berita dari sumber lainnya, (f) Hindari mengakses kembali media yang menyebarkan informasi palsu. Hal yang paling penting bagi masyarakat terkait berita palsu ini adalah bagaimana mereka dapat menahan diri untuk tidak terburu-buru menyebarluaskan informasi yang diterima sebelum mengetahui kelengkapan dan kebenaran dari informasi tersebut (Gumilar, dkk., 2017).

2. Pihak penanggung jawab dalam mengatasi krisis informasi



Dari total 102 responden, mayoritas memilih masyarakat sendiri (pendidikan/literasi) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, dengan persentase sebesar 61,8%. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa ketahanan terhadap krisis informasi sangat bergantung pada kemampuan individu dan komunitas dalam meningkatkan literasi digital. Sementara itu, 21,6% responden menilai pemerintah melalui regulasi dan hukum sebagai pihak yang berperan penting, sedangkan 16,7% responden menunjuk penyedia platform digital seperti Meta, TikTok, dan Google sebagai pihak yang turut bertanggung jawab.

Di era saat ini, kemampuan membaca dan menulis secara digital sangat krusial karena hampir semua elemen kehidupan melibatkan interaksi secara digital, mulai dari pendidikan yang bergantung pada sumber daya internet hingga dunia kerja yang memerlukan alat digital untuk berkomunikasi dan meningkatkan produktivitas (Nurjanah, dkk., 2024).

Solusi untuk meningkatkan literasi digital dimasyarakat dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan internet secara bijak. Masyarakat juga perlu dibiasakan untuk berpikir kritis dan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas ASN Keminimipas didapatkan informasi berupa larangan penggunaan alat komunikasi bagi warga binaan, misalnya penggunaan *handphone*. Sehingga dapat menciptakan batasan akses terhadap dunia luar. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan literasi digital, mengingat warga binaan tidak memiliki sarana untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat.

Solusi yang diberikan oleh petugas ASN Kemenimipas di antaranya warga binaan diberikan edukasi mengenai etika bermedia sosial agar warga binaan memahami dasar-dasar literasi digital, lalu terdapat juga kegiatan pembinaan seperti “jeruji” (jemaah rutan mengaji) supaya warga binaan memiliki akhlak yang baik dan tidak melakukan kejahatan kembali, selain itu terdapat juga kegiatan pembuatan gelang dan roti yang hasilnya dapat diperjual belikan saat kegiatan pada Event Bandar Lampung Expo. Terdapat juga warga binaan yang beternak ayam, ikan, dan menjadi tukang bangunan yang semuanya difasilitasi oleh lembaga Kemenimipas, ucap Kak Bima selaku narasumber. Program kemandirian ekonomi di Lapas seperti roti, kerajinan, dan peternakan merupakan wujud civic virtue: membentuk warga binaan yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi. Keterampilan produktif ini jadi jangkar karakter, membantu mereka keluar dari krisis mentalitas

dan lebih tahan terhadap disinformasi saat kembali ke masyarakat digital.

Untuk menanggulangi hoaks, pemerintahan Indonesia telah menerapkan sejumlah peraturan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur tentang konsekuensi hukum bagi individu yang menyebarkan hoaks, termasuk berbagai sanksi pidana, sanksi administratif, serta dampak sosial dan profesional. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menghentikan dan menindaklanjuti penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat menyebabkan kerugian atau kekacauan. Konsekuensi hukum bagi orang-orang yang menyebarkan hoaks cukup berat, berupa hukuman penjara selama 6-10 tahun dan denda yang bisa mencapai 1 miliar rupiah. Di samping itu, pelaku juga berisiko mengalami konsekuensi sosial, pemblokiran akun atau website, serta kemungkinan dihadapkan pada gugatan perdata (Wibowo & Sudarto, 2024).

Kesimpulan

Fenomena *echo chamber* di era *post-truth* telah memperlihatkan bagaimana ruang publik digital yang homogen dapat memperkuat polarisasi, menurunkan toleransi terhadap perbedaan, serta melemahkan kualitas pemikiran demokratis. Kondisi ini menimbulkan ancaman nyata bagi integrasi nasional dan kohesi sosial, karena masyarakat cenderung terjebak dalam arus informasi yang bias dan emosional.

Di tengah tantangan tersebut, *civic virtue* hadir sebagai fondasi normatif yang menekankan kebajikan warga negara dalam bersikap kritis, rasional, dan menghargai pluralitas. Dengan menumbuhkan sikap ini, masyarakat dapat lebih tangguh menghadapi disinformasi, sekaligus menjaga semangat kebersamaan dan kualitas demokrasi. Manifesto *civic virtue* menjadi pedoman kolektif yang relevan untuk mengarahkan perilaku bermedia sosial secara bertanggung jawab, sehingga demokrasi tetap kokoh dan persatuan bangsa terjaga di era digital yang penuh arus informasi menyesatkan.

Pada akhirnya, membangun ketahanan informasi nasional adalah tanggung jawab yang tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Selain itu etika komunikasi digital tidak hanya bersifat individual saja, tetapi juga struktural dan institusional. Dengan demikian, manifesto *civic virtue* yang dirumuskan dalam kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi wacana akademis, tetapi benar-benar menjadi panduan praktis bagi seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat sipil, institusi pendidikan, maupun platform digital untuk bersama-sama mewujudkan ruang publik digital yang sehat, inklusif, dan berlandaskan kebenaran demi kokohnya persatuan dan demokrasi Indonesia.

Referensi

- Anwar, M. (2021). Literasi Digital dan Tantangan Disinformasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Informasi*, 9(2), 112–126.
- Anwar, R. N. (2021). Penyuluhan Urgensi Tabayun Dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks Di Media Sosial pada Masa COVID-19. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian*, 1(1), 1024–1030
- Aroyo, DO, Putri, KA, & Shakira, SP (2025). Peran Literasi Digital Dalam Menangani Berita Hoaks: Studi Kasus Penipuan Hadiah. *Jurnal*

.....

Media Digital, 1 (01), 60-72.

- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The Echo Chamber Effect On Social Media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9)
- Dinata, K. B. (2021). Kemampuan Membaca Dan Menulis Secara Digital Dalam Proses Pembelajaran Online. *Eksponen*, 11(1), 20–27.
- Gumilar, G. (2017). Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) oleh Siswa SMA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Hidayat, R. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Digital Masyarakat Modern. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 30–40.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Chadwick, M. (2020). Can Corrections Spread Misinformation To New Audiences? Testing For The Elusive Familiarity Backfire Effect. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 5(1), 41.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2020). Misinformation and Its Correction: Continued Influence And Successful Debiasing. *Psychological Science in the Public Interest*, 13(3), 106–131.
- Mustain, M. (2022). Etika Komunikasi Digital Dan Tantangan Post-Truth di Indonesia. *Jurnal Etika & Teknologi*, 5(2), 45–60.
- Nisa, K. (2024). Peran Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Dan Disinformasi Di Media Sosial. *Impressive Journal Of Education*, 2(1), 1 11.
- Nurjanah, D. S., Masithoh, U. D., & Zulfaidah, R. A. (2024). Literasi Digital dalam Dunia Pendidikan di Era Revolusi Society 5.0 Termasuk Pemanfaatan ICT pada Pendidikan. *Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Teori dan Hasil Pendidikan Dasar*, 3(1), 99-109.
- Palupi, D. (2020). Pentingnya Literasi Digital dalam Menghadapi Perkembangan Informasi di Era Modern. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 5(1), 12–20.
- Sarjito, A. (2024). Hoaks , Disinformasi , Dan Ketahanan Nasional : Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal Of Governance And Local Politics*, 6(2), 175–186.
- Setiawan, J., & Sudrajat, A. (2018). *Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan*. Gadjah Mada University.
- Suharyanto, A. (2019). Langkah-Langkah Menghindari Kasus Hoaks Di Media Digital. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 7(2), 45–53.

- [illegible]